

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*. Brebes: Penerbit Diya Media Group, 2020.
- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bemartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Firmansyah, Arifin. *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati dan Resistensi*. Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017.
- Komisi Yudisial. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2018.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013.
- Marpaung, Lintje Anna. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Rasyid, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Siomin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi (Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suparto. *Komisi Yudisial Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan Dan Prospeknya*. Jakarta: Bina Karya, 2021.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Purwanti, Ani. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Semarang: Undip Press, 2022.

JURNAL

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2, 2015. Hlm. 221, 218-219.
- Asy'ari, Syukri, dkk. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10 No. 4, 2013. Hlm. 9.
- Basri, Muhammad Hasan. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006". *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 6, No. 3, 2021. Hlm. 521.
- Charity, May Lim. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 1, 2016. Hlm. 3.
- Chaidir, Ellydar dan Suparto. "Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya". *Jurnal UIR Law Review*. Vol. 1 No. 2, 2017. Hlm 122-123.
- Fauzan, Muhammad, dkk. "Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia (Studi Kasus Pengubahan Putusan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah)". *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 5 No. 2, 2023. Hlm. 4.
- Firdaus, Sunny Unmul, dkk. "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20 No. 1, 2020. Hlm. 5.
- Fuqoha. "Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional". *Jurnal Sawala*. Vol. 3 No. 3, 2010. Hlm. 40.
- Iswandi, Kelik dan Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2, 2020. Hlm. 138-139.
- Lubis, Romadhan. "Menteri Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia". *Journal Of Juridische Analyse*. Vol. 2 No. 2, 2023. Hlm. 108, 116.

- Malik, Abdul. "Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, 2008. Hlm. 4.
- Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi". *Jurnal Fiat Justicia*. Vol. 9 No. 3, 2008. Hlm. 317.
- Muslih. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch". *Jurnal Legalitas*. Vol. 4 No. 1, 2017. Hlm. 142.
- Niru, A. S. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 59 No. 2, 2020. Hlm. 3.
- Prayogo, Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 2, 2016. Hlm.193.
- Priambdi, Zakaria, dkk. "Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 13 No. 1, 2022. Hlm. 2.
- Ramadan, Wahyu Aji, dkk. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi". *Jurnal Studi Legalia*. Vol. 3 No. 2, 2022. Hlm. 28-29.
- Ridwan, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 No. 2, 2015. Hlm. 312.
- Safiudin, Achmad. "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Sifayah". *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6 No. 1, 2016. Hlm. 83.
- Sihombing, Eka dan Cynthia Hadita. "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)*. Vol. 1 No. 1, 2022. Hlm. 36.
- Sorik, Sutan. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15 No. 3, 2018. Hlm. 675, 677.

Sri Darmadi, Nanang. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 26 No. 2, 2011. Hlm. 668.

Sunarto. "Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45 No. 2, 2016. Hlm. 158.

Suparto. "Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial". *Pagaruyung Law Journal*. Vol. 2 No. 2. 2019. Hlm. 202.

Suparto. "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 7 No. 4, 2017. Hlm. 502.

Windrawan, Puguh. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7 No. 1, 2014. Hlm. 89.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

INTERNET

Humas MKRI. *MK Bentuk MKMK Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi.*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19690&menu=2>.
Diakses pada 18 Maret 2024.

Humas MKRI. *MK Resmi Bentuk MKMK Permanen.*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19882&menu=2>.
Diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

Humas MKRI. *Perpisahan Dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi.*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17897&menu=2>.
Diakses pada 15 Februari 2024.

Komisi Yudisial. *Sejarah Pembentukan.*
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky.
Diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

Mantalean, Viotori dan Noviani Setuningsih. *Diperiksa Khusus, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Diklaim Paling Bersih dari Tuduhan Langgar Etik.*
<https://nasional.kompas.com/read/2023/11/02/21242651/diperiksa-khusus-hakim-konstitusi-wahiduddin-adams-diklaim-paling-bersih>. Diakses pada 17 Maret 2024.

Mardatillah, Aida. *Dua dari Tiga Dewan Etik MK Habis Masa Jabatannya.*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-dari-tiga-dewan-etik-mk-habis-masa-jabatannya-lt62639c2d869cd/>. Diakses pada 22 Februari 2024.

Mardatillah, Aida. *Mengenal Ragam Jenis Amar Putusan MK.*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-ragam-jenis-amar-putusan-mk-lt600a81ac7b053/?page=2>. Diakses pada 29 Februari 2024.

Prima, Andri. *Mengenal Teguran Lisan, Sanksi yang Diberikan MKMK Kepada 6 Hakim MK.* <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ob3Zo45N-mengenal->

[teguran-lisan-sanksi-yang-diberikan-mkmm-kepada-6-hakim-mk](#).
pada 18 Maret 2024.

Diakses